

**TELAH DIREVIU
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

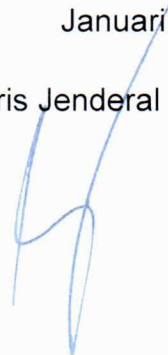
Kami telah melakukan reviu Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam reviu Perjanjian Kinerja Tahunan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 ini.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a loop.

Suganda Pandapotan Pasaribu

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dodi Wahyugi
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TEKNOLOGI INFORMASI,

Dodi Wahyugi
NIP. 198106222003121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Jumlah pengelolaan layanan data dan informasi	1 Layanan
	Jumlah laporan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi	212 Laporan
	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan sistem	1 Sistem Informasi
	Jumlah pengelolaan layanan perpustakaan	1 Layanan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi	
Output 1: Layanan Data dan Informasi	Rp 6.696.000
Output 2: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 125.866.000
Output 3: Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	Rp 535.122.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Umum	8.171.000
Output 2: Layanan Perkantoran	Rp 2.696.356.000
Total	Rp 3.372.211.000

Jakarta, Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
TEKNOLOGI INFORMASI,



Dodi Wahyugi
NIP. 198106222003121003



DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Jumlah pengelolaan layanan data dan informasi	1 Layanan	Merupakan layanan Data dan Informasi yang terdiri atas: dashboard laporan masyarakat Ombudsman RI, data-data prioritas nasional, hasil penilaian evaluasi indeks pemerintah digital Ombudsman 2026, portal data Ombudsman, hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2026, dokumen roadmap teknologi informasi Ombudsman RI 2026–2029, dokumen arsitektur digital Ombudsman RI, dan peta implementasi roadmap dalam bentuk matriks program per tahun	Data Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan data dan informasi yang diberikan selama 1 tahun
	Jumlah laporan kegiatan hubungan	212 Laporan	Merupakan produk kegiatan kehumasan yang terdiri atas: a) Hubungan antar lembaga (<i>media</i>	Laporan Kegiatan Hubungan	Berdasarkan jumlah laporan kegiatan hubungan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	masyarakat dan informasi		relation, media monitoring, dan fasilitasi pendampingan kunjungan antar lembaga); b) Kemitraan strategis dan pengembangan jejaring masyarakat (sosialisasi peran Ombudsman serta pengelolaan informasi dan dokumentasi); dan c) Pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi (peliputan dan dokumentasi pimpinan, pengelolaan website, pengelolaan media sosial)	Masyarakat Dan Informasi	masyarakat dan informasi yang yang disusun
	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan sistem	1 Sistem Informasi	Merupakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL)	Data Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem	Berdasarkan jumlah produk Sistem Informasi yang dipelihara dan dikembangkan
	Jumlah pengelolaan layanan perpustakaan	1 Layanan	Merupakan layanan pengelolaan perpustakaan berupa penambahan koleksi umum sebagai bahan referensi dan rujukan yang dilayankan di perpustakaan dan pojok baca Ombudsman, peningkatan literasi terkait pemanfaatan koleksi digital	Data Pengelolaan Layanan Perpustakaan	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan perpustakaan yang diberikan selama 1 tahun

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Deskripsi	Sumber Data	Cara Mengukur
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan	Merupakan layanan operasional Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Data Layanan Pengelolaan Operasional Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Berdasarkan jumlah layanan pengelolaan operasional yang diberikan selama 1 tahun